

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan ialah teori yang menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), dimana pihak tertentu (pemilik) memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama mereka dengan pendelegasian wewenang kepada agen dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori keagenan mencakup kedua belah pihak yaitu *principal* dan *agent* dengan peran dan fungsinya masing-masing. *Principal* sebagai pihak yang memiliki modal mempunyai akses untuk mengetahui seluruh informasi internal perusahaan, sedangkan agen merupakan pihak yang menjalankan kegiatan operasional memiliki seluruh informasi internal perusahaan. Dalam hal auditing, kedua belah pihak diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap keputusan yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu kemudian kebutuhan orang lain. Teori keagenan berlandaskan pada 3 sifat dasar manusia. Sifat yang pertama adalah *self interest*, yaitu sifat manusia yang mengutamakan dirinya sendiri. Sifat kedua adalah *bounded rationality*, yakni terbatasnya daya pikir manusia mengenai masa depan. Sifat ketiga adalah *risk averse*, yakni sifat manusia yang cenderung untuk menghindari risiko.

Teori keagenan didasari oleh dua masalah utama, yaitu asimetri informasi (*Asymmetric information*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana pihak tertentu memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Asimetri informasi memiliki dua tipe, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* ialah masalah yang terjadi jika agen tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam kerja. Sedangkan *adverse selection* adalah suatu kondisi yang mana *principal* tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh *agent* tersebut berdasarkan informasi yang ia miliki atau berdasarkan kelalaian.

Masalah kedua yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*). Masalah ini timbul karena *principal* sebagai pemegang saham mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen selaku manajer yang merupakan wakil dari para pemegang saham. Kepemilikan seperti ini mengakibatkan suatu permasalahan yaitu keputusan yang agen buat tidak selalu bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (*principal*). Tujuan agen dan *principal* berbeda dapat menimbulkan konflik. Manajer fokus mengejar keuntungan pribadi sehingga fokus pada investasi dan proyek dengan laba tinggi jangka pendek daripada fokus dengan proyek dan investasi laba tinggi jangka panjang.

Teori keagenan menyatakan bahwa susah untuk mempercayai bahwa agen akan selalu melakukan tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan *principal*, maka *principal* wajib melakukan pengawasan terhadap manajer.

Principal membutuhkan pihak ketiga yakni auditor independen untuk memeriksa informasi yang diberikan agen kepada *principal*. Agen juga memerlukan auditor independen untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan. Selanjutnya kreditor juga memerlukan auditor untuk mengetahui bahwa modal yang mereka berikan benar-benar digunakan sesuai kesepakatan, sehingga kreditor dapat menerima bunga atas pinjaman yang mereka berikan.

Jasa audit yang dilakukan oleh auditor sebagai bentuk pengawasan dari pihak ketiga yang independen ini mengharuskan perusahaan untuk membayar *monitoring cost* dalam bentuk *fee* audit kepada auditor. Aristiyawan (2020) menyatakan *monitoring cost* merupakan biaya untuk mengawasi segala bentuk tindakan agen apakah sudah sesuai dengan kepentingan *principal* atau hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Besarnya *fee* yang dibayarkan oleh perusahaan berbeda-beda, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Setelah mengetahui faktor-faktor yang berkemungkinan memiliki pengaruh terhadap besarnya *fee* audit, diharapkan perusahaan dapat membayar *fee* audit yang wajar dan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit tersebut.

2.2 *Fee Audit*

Mulyadi (2016) menjelaskan *fee* audit ialah bayaran yang diberikan oleh entitas klien kepada akuntan publik, yang merupakan imbalan atas jasa yang

diberikan oleh akuntan publik yakni pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan oleh KAP terhadap laporan keuangan perusahaan. *Fee* audit merupakan imbalan yang diberikan oleh entitas yang menggunakan jasa auditor eksternal kepada KAP. Besar *fee* audit tergantung dari seberapa luas dan kompleks audit yang dilakukan dan seberapa baik reputasi kantor akuntan publik di mata investor, pemerintah, dan masyarakat. Auditor harus tetap bersikap independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, walaupun *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan kepada KAP besar. Maka dari itu *fee* audit merupakan masalah yang dilematis, karena perusahaan membayar biaya atas jasa yang auditor berikan, tetapi auditor harus memberikan opini yang benar terhadap laporan keuangan perusahaan dan tetap bersikap independen.

Peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) nomor 2 tahun 2016 mengenai imbalan jasa menjelaskan bahwa saat auditor melaksanakan audit, maka KAP memiliki hak untuk menerima imbalan jasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh akuntan publik dan kliennya yang tertulis dalam surat perikatan. Untuk membantu para akuntan publik dalam menentukan besarnya imbalan jasa, IAPI menetapkan panduan penentuan besarnya imbalan atas jasa audit.

Dalam menentukan imbalan jasa audit, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh akuntan publik ialah:

- Ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan klien
- Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit

- Tanggung jawab dan tugas menurut hukum
- Tanggung jawab dan tingkat keahlian yang dibutuhkan pada pekerjaan yang dilakukan
- Tingkat kompleksitas pekerjaan
- Jumlah personel serta jumlah waktu yang dibutuhkan untuk secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan
- Sistem pengendalian mutu kantor
- Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati

Setiap akuntan publik harus menetapkan kebijakan sebagai dasar menentukan besarnya biaya audit. Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Menentukan tarif imbalan jasa standar per jam untuk setiap tingkatan auditor
- b. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar
- c. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam surat perikatan.

IAPI mengeluarkan indikator batas bawah imbalan jasa per jam ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Nilai tersebut digunakan sebagai nilai indikator batas bawah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan imbalan jasa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, maka auditor dapat menetapkan imbalan jasa yang lebih tinggi dari nilai diatas. Jika imbalan jasa yang ditetapkan lebih rendah daripada nilai diatas, maka jumlah imbalan jasa tersebut memiliki kemungkinan tidak mencukupi untuk melakukan prosedur audit sesuai kode etik, SPAP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IAPI juga telah mengeluarkan 3 metode yang dapat digunakan akuntan publik untuk menentukan keseluruhan imbalan jasa:

1. Jumlah keseluruhan imbalan jasa yang bersifat lumpsum

Fee audit yang dibayar secara lumpsum membuat auditor harus dapat memperkirakan anggaran jumlah jam kerja setiap anggota perikatan

untuk melakukan pekerjaan audit mulai dari saat pra-perikatan sampai dengan tahanan penyelesaian pelaporan.

2. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan.

Dalam menentukan besarnya biaya audit, auditor harus menyusun perkiraan jam kerja setiap personil yang memproyeksikan jam kerja yang digunakan sesungguhnya untuk memberikan gambaran besarnya *fee* audit.

3. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil dengan ditentukan jumlah minimal atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Anggota harus memperkirakan jumlah jam kerja untuk melaksanakan pekerjaan audit dengan prosedur minimal dan jumlah jam yang dibutuhkan bila terdapat penambahan cakupan prosedur audit.

Dalam ketiga metode tersebut auditor harus melaksanakan rangkaian prosedur audit dan pemenuhan SPAP serta kode etik yang berlaku. Auditor dilarang mengurangi prosedur audit untuk mengurangi jam kerja sehingga menurunkan biaya audit.

2.3 Risiko Perusahaan

Nisak (2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan adalah keadaan dimana ada kemungkinan terjadi beberapa hal yang akan menyebabkan turunnya kinerja

perusahaan. Masa depan yang di penuhi oleh banyak ketidakpastian membuat perusahaan harus siap menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko hutang. Perusahaan meminjam dana dari pihak ketiga untuk membesarkan perusahaannya. Namun dana pinjaman itu dapat bermanfaat jika dilakukan dengan efisien. Dana utang yang dimanfaatkan sebaik-baiknya bisa jadi akan menambah nilai perusahaan, memperbesar perusahaan. Tetapi jika tidak di pergunakan dengan efisien, maka bisa jadi utang tersebut akan menimbulkan masalah lain untuk perusahaan. Salah satunya adalah kebangkrutan, karena perusahaan tidak mampu membayar dana pokok dan bunga.

Dalam mengukur risiko perusahaan, berikut proksi-proksi yang dapat digunakan:

1. *Lverage*.

Menurut Naser dan Hassan (2016), *leverage* adalah unsur penting dalam suatu pendanaan, karena *leverage* menghitung rasio hutang terhadap aset. Pengukuran *leverage* yang sering digunakan adalah dengan DAR (*Debt to Asset Ratio*).

2. Peringkat obligasi

Suryanto dkk (2018) menyatakan penggunaan proksi peringkat obligasi dapat melihat ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang.

Penelitian ini mengukur risiko perusahaan dengan rasio *leverage*. Kasmir (2015) menjelaskan *leverage* ialah rasio untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* dapat memberikan indikasi kepada pembaca laporan keuangan mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya, maka pembaca dapat memproyeksikan perusahaan dimasa mendatang. *Leverage* menghitung sejauh mana perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya apabila perusahaan dilikuidasi. Rumus untuk mengukur risiko perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan membagi total hutang perusahaan dengan total aset perusahaan. Putra (2008) menjelaskan bahwa proporsi hutang terhadap aset dapat mengukur risiko perusahaan, karena proporsi hutang terhadap aset yang tinggi menandakan banyaknya aset yang diperoleh dengan hutang. Banyaknya aset yang diperoleh dengan hutang dapat menyebabkan perusahaan memiliki kemungkinan gagal dalam membayar hutang-hutangnya dan memiliki risiko kebangkrutan. *Leverage* sebagai salah satu cara yang digunakan auditor untuk menghitung risiko perusahaan, karena jika perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya melalui hutang, perusahaan tersebut mempunyai risiko yang besar, karena hal tersebut berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan.

2.4 Kompleksitas Perusahaan

Nurwulansari (2017) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan merupakan kerumitan transaksi dalam suatu perusahaan. Kerumitan transaksi perusahaan berasal dari jumlah transaksi yang berlangsung serta mencerminkan tingkat produktivitas perusahaan yang bertambah. Kompleksitas perusahaan ialah

salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan auditor eksternal saat menetapkan besarnya *fee* audit yang akan diterima. Naser dan Hassan (2016) menyatakan bahwa auditor memerlukan waktu yang lebih panjang serta kemampuan yang lebih tinggi saat mengaudit laporan keuangan klien yang rumit, sehingga mempengaruhi besarnya imbalan jasa yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Macam-macam metode sudah digunakan untuk mengukur kompleksitas perusahaan. Sebagian besar penelitian mengenai kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah anak perusahaan, transaksi dengan mata uang lain, dan kegiatan usaha diluar negeri. Pengukuran yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan jumlah anak perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan jumlah anak perusahaan sebagai alat ukur variabel kompleksitas perusahaan, karena semakin banyak jumlah anak perusahaan maka semakin sulit dan kompleks laporan keuangan yang harus di audit oleh auditor.

Dalam penelitian ini, kompleksitas perusahaan diukur dengan menggunakan jumlah anak perusahaan sesuai dengan penelitian Naser dan Hassan (2016). Perusahaan memiliki anak perusahaan dengan tujuan untuk melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Bisnis yang semakin besar pasti membuat anak perusahaan agar lebih berkembang lagi. Perusahaan dengan anak perusahaan wajib menyusun laporan konsolidasi. Hal ini menyebabkan auditor membutuhkan waktu, keahlian, dan tenaga yang lebih lagi untuk melakukan audit pada

perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan. Dengan demikian *fee* audit yang dibayarkan juga semakin tinggi.

2.5 Kepemilikan Institusional

Menurut Susanti dan Riharjo (2013), kepemilikan institusional ialah sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh institusi atau lembaga. Menurut Annisa dan Lulus (2012), kepemilikan sebagian besar saham yang dipegang oleh institusi memegang peran penting dalam mendisiplinkan, mengawasi, dan mengelola jalannya perusahaan. Manajer yang diberi wewenang oleh pemilik harus dapat mengelola jalannya perusahaan dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan laba. Jika laba yang diperoleh tinggi, maka dividen yang didapatkan pemilik juga tinggi. Pemilik berpendapat bahwa, manajer yang telah diberi wewenang harus dapat bekerja dengan baik dan menghindari perilaku-perilaku yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Adanya perbedaan kepentingan membuat pemilik harus memastikan bahwa manajer melaksanakan tugasnya dengan baik dan memaksimalkan serta mensejahterakan pemegang saham.

Sukirni (2012) menjelaskan kepemilikan institusional ialah saham yang dimiliki oleh institusi, seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi. Maka sebagai pemegang saham, institusi memiliki peranan penting dalam melakukan *monitoring* perusahaan. Kepemilikan institusional dapat mengawasi jalannya perusahaan dengan lebih maksimal. *Monitoring* yang dilakukan itu bertujuan

untuk memastikan bahwa manajer tidak melakukan kecurangan yang mementingkan diri sendiri dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Azadi dan Mohammadi (2014), kepemilikan institusional ini memegang sebagian besar saham perusahaan, maka pengawasan yang dilakukanpun lebih optimal.

2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994) dalam Septianingrum (2014), ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Chandra (2015) menjelaskan, perusahaan besar dinilai memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membayar *fee* audit, dan akan segera membayarnya setelah tahun tutup buku perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan banyak cara, yaitu dengan *logaritma natural* dari aset, jumlah pendapatan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Di Indonesia perusahaan besar atau kecil diatur dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997, perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang total asetnya tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sedangkan perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)

Penelitian ini menggunakan *logaritma natural* dari total aset. Penelitian ini menggunakan *logaritma natural* karena biasanya total aset bernilai besar, maka total aset disederhanakan dengan menggunakan *logaritma natural* aset atau Ln

Aset. Penggunaan *logaritma natural* ini dapat menyederhanakan angka milyaran atau trilyunan tanpa mengubah proporsi total aset sesungguhnya, sehingga dapat mempermudah pengolahan data.

Menurut Sutrisno (2012), aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan untuk mendapatkan laba. Aset atau aktiva dikelompokkan menjadi dua yakni :

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang digunakan dalam waktu singkat, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Contoh dari aset lancar adalah efek, kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, dan pendapatan.

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar merupakan aset yang dapat digunakan lebih dari satu tahun. Aset tidak lancar dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

- a. Aset Tetap

Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan secara permanen. Contohnya : bangunan dan gedung, tanah, mesin, peralatan, inventaris, dan kendaraan.

b. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan kekayaan yang tidak dapat disentuh. Contohnya : hak guna bangunan, hak paten, hak kontrak, hak sewa, dan lain sebagainya

c. Investasi Jangka Panjang

Aset ini mencakup semua investasi jangka panjang. Contohnya : perusahaan A berinvestasi di perusahaan B, maka perusahaan A harus mencatat asetnya yang berupa investasi di dalam laporan posisi keuangan.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap *fee* audit. Hasil penelitian Kusharyanti (2013) memperoleh hasil yaitu kompleksitas audit, audit tenure ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, dan spesialisasi audit memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit. Kemudian mendapatkan hasil berpengaruh negatif untuk variabel risiko audit, kondisi keuangan perusahaan, Komite audit terhadap audit *fee*.

Primasari dan Zulaikha (2017) menganalisis pengaruh manajemen laba, ukuran KAP, dan *leverage* terhadap *fee* audit terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, didapatkan hasil manajemen laba dan ukuran KAP

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit, sedangkan *leverage* menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap *fee* audit.

Christansy dan Ardiati (2018) menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Didapatkan hasil berupa ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit. Sedangkan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Suryanto dkk (2018) meneliti pengaruh keberadaan komisaris independen, keberadaan komite audit, keberadaan pemegang saham mayoritas, dan risiko perusahaan terhadap *fee* audit dan didapatkan hasil berupa keberadaan komisaris independen, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sedangkan keberadaan komite audit dan keberadaan pemegang saham mayoritas tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Wedari (2015) menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan kepemilikan institusional terhadap *fee* audit, dan mendapatkan hasil bahwa karakteristik komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kusharyanti (2013)	Variabel Independen Ukuran perusahaan, kompleksitas audit, risiko audit, ukuran kantor akuntan publik, kondisi keuangan perusahaan, audit tenure, komite audit, dan spesialisasi audit. Variabel Dependen <i>Fee</i> audit.	Spesialisasi audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, kompleksitas audit, dan <i>audit tenure</i> , memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit, sedangkan kondisi keuangan perusahaan, risiko audit, dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit.
2.	Primasari dan Zulaikha (2017)	Variabel Independen Ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> Variabel Dependen <i>Fee</i> Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran KAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>fee</i> audit, sedangkan <i>leverage</i> menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap <i>fee</i> audit.

3.	Christansy dan Ardiati (2018)	Variabel Independen kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP Variabel Dependen <i>Fee Audit</i>	Hasil penelitian adalah ukuran perusahaan dan ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit. Sedangkan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
4.	Suryanto dkk (2018)	Variabel Independen Keberadaan komisaris independen, risiko perusahaan, keberadaan komite audit, dan keberadaan pemegang saham mayoritas. Variabel Dependen <i>Fee Audit</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit. Sedangkan keberadaan komite audit dan keberadaan pemegang saham mayoritas tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.

5.	Wedari (2015)	Variabel Independen Karakteristik komite audit dan kepemilikan institusional Variabel Dependen <i>Fee Audit</i>	Karakteristik komite audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
----	---------------	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2009) menjelaskan kerangka pemikiran merupakan sintesa mengenai hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, yang disusun dari berbagai teori untuk dianalisis sehingga menghasilkan sintesa hubungan antar variabel yang kemudian digunakan untuk menyusun hipotesis.

2.8.1 Hubungan antara Risiko Perusahaan dan *Fee Audit*

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti akan mengalami kondisi-kondisi tertentu yang belum pernah dialami sebelumnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat membuat kinerja perusahaan menjadi menurun. Risiko yang di maksud dalam penelitian ini adalah risiko hutang. Dalam menghitung risiko hutang, di perlukan suatu pengukuran yaitu *leverage*. *Leverage* adalah salah satu unsur untuk menghitung hutang terhadap aset. Semakin besar *leverage*, maka semakin berisiko suatu perusahaan. Dalam hal ini auditor harus berhati-hati dalam melakukan audit

pada perusahaan berisiko tinggi, agar tidak terjadi kegagalan audit. Untuk mencegah kegagalan audit tersebut auditor perlu melakukan pengujian intensif yang berakibat pada semakin tingginya *fee* audit.

2.8.2 Hubungan antara Kompleksitas Perusahaan dan *Fee* Audit

Kompleksitas perusahaan berhubungan dengan kerumitan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kompleksitas perusahaan bisa karena perusahaan memiliki banyak anak perusahaan. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan wajib membuat laporan konsolidasi. Semakin banyak anak perusahaan, maka semakin kompleks laporan keuangan yang harus di audit. Jika perusahaan memiliki anak perusahaan dengan jumlah yang banyak, maka jumlah waktu, tenaga, dan personil yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini membuat perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan membayar *fee* audit lebih tinggi

2.8.3 Hubungan antara Kepemilikan Institusional dan *Fee* Audit

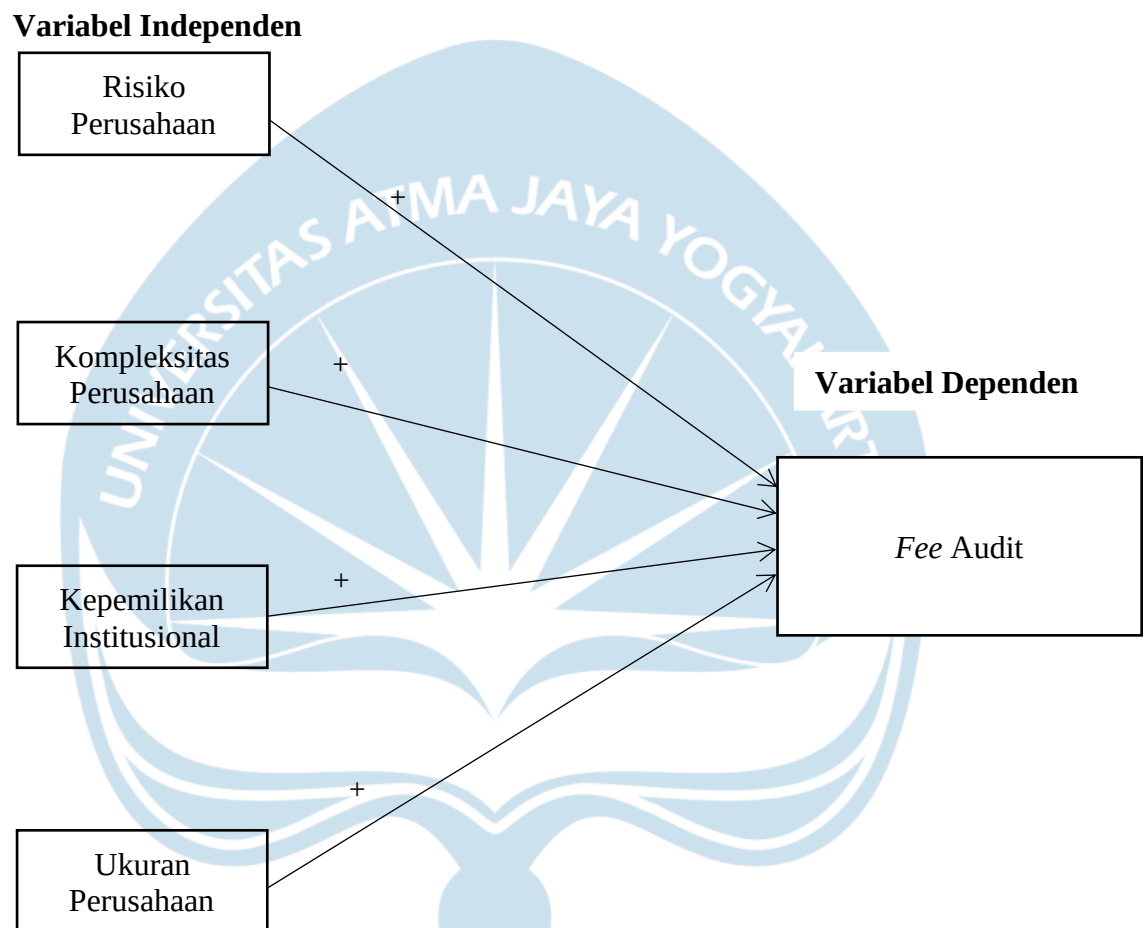
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan sebagian besar saham perusahaan oleh institusi atau lembaga. Jika kepemilikan saham oleh institusi tinggi, maka pengawasan perusahaan akan sangat menonjol. Institusi akan memonitor jalannya perusahaan, termasuk saat menyusun laporan keuangan. Kepemilikan saham oleh institusi yang besar membuat institusi dapat mempengaruhi keputusan manajer dalam pemilihan auditor eksternal. Institusi akan memilih menggunakan KAP berkualitas tinggi dan memiliki reputasi baik

untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Pemilihan KAP berkualitas tersebut dapat membuat *fee* audit juga semakin tinggi.

2.8.4 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Fee* Audit

Ukuran perusahaan berhubungan dengan luasnya cakupan audit. Perusahaan besar biasanya terlibat dalam transaksi besar dan memiliki transaksi yang banyak. Banyaknya transaksi tersebut membuat auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti saat melakukan proses audit pada perusahaan besar. Banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan dan luasnya cakupan audit membuat auditor memerlukan waktu, sumber daya, dan tenaga yang lebih banyak. Banyaknya waktu, sumber daya, tenaga, dan kerumitan proses audit ini membuat *fee* audit yang ditetapkan juga semakin tinggi.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis ialah suatu anggapan yang mungkin benar. Hipotesis digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya atau dasar pembuatan keputusan. Hipotesis berfungsi sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan membantu untuk membuat rancangan kesimpulan penelitian.

2.9.1 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *Fee Audit*

Menurut Wardani (2017), risiko perusahaan ialah suatu kondisi yang dimungkinkan dapat menurunkan kinerja perusahaan sebagai akibat dari suatu kondisi tertentu. Risiko perusahaan dalam penelitian ini adalah risiko hutang dan diukur dengan *leverage*. Kasmir (2015) menyatakan bahwa *leverage* mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rumus rasio *leverage* adalah membagi total hutang perusahaan dengan total aset perusahaan. Putra (2008) menjelaskan bahwa proporsi hutang terhadap aset dapat mengukur risiko perusahaan karena proporsi hutang terhadap aset yang tinggi menandakan banyaknya aset yang diperoleh dengan hutang. Tingginya aset yang diperoleh dengan hutang tersebut membuat semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar hutang-hutangnya dan memiliki risiko kebangkrutan. Maka rasio *leverage* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi karena perusahaan memiliki kemungkinan gagal dalam membayar hutang-hutangnya dan menyebabkan kebangkrutan. Perusahaan yang menggunakan hutangnya dengan efisien, dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi jika perusahaan tidak menggunakan hutangnya secara efisien akan berdampak munculnya masalah lain untuk perusahaan, salah satunya kebangkrutan. Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Lucyanda dan Nura'ni (2013), rasio *leverage* dapat memberikan indikasi kesehatan maupun kesulitan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan berakibat pada besarnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, karena perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menutupi rendahnya kemampuan keuangan

perusahaan. Dalam hal ini auditor harus berkompeten untuk menghindari kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Simunic (1980) dalam Kikhia (2015) menyatakan, perusahaan dengan risiko tinggi, memiliki kemungkinan besar akan terjadinya risiko kegagalan audit. Kegagalan audit dapat terjadi jika auditor gagal menemukan kesalahan material yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menghindari kegagalan audit tersebut, perlu dilakukan pengujian intensif yang berakibat pada semakin besarnya *fee* audit

Menurut Suryanto dkk (2018) risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit. Semakin besar risiko perusahaan maka semakin besar pula *fee* audit. Hasil penelitian Septianingrum (2014) menunjukkan hasil yang sama yaitu risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Namun penelitian Kikhia (2015) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu risiko perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *fee* audit. Dengan demikian, maka hipotesis pertama ialah:

H1 : Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit

2.9.2 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit

Menurut Cameran (2005) dalam Yulio (2016) kompleksitas perusahaan ialah kerumitan transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kompleksitas perusahaan dapat diukur menggunakan jumlah anak perusahaan, banyaknya cabang transaksi dengan menggunakan mata uang asing, dan melakukan operasi bisnis diluar negeri. Dalam penelitian ini, kompleksitas perusahaan diukur dengan

jumlah anak perusahaan. Anak perusahaan merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk, maka dari itu segala keputusan yang dibuat oleh anak perusahaan harus diketahui dan mendapat persetujuan dari perusahaan induknya. Kholishah (2013) menyatakan, kompleksitas perusahaan tergantung pada keberadaan, lokasi, serta jumlah anak perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan dan memiliki anak perusahaan diluar negeri tentu akan meningkatkan kompleksitas perusahaan. Menurut Yulio (2016), anak perusahaan yang berada diluar negeri memiliki regulasi dan persyaratan legislatif berbeda sehingga memerlukan pengujian audit lebih lanjut dan membutuhkan lebih banyak waktu serta tenaga kerja dalam menyelesaikan proses audit. Perusahaan dengan anak perusahaan juga harus membuat laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi merupakan laporan gabungan dari induk perusahaan serta anak perusahaan. Maka semakin banyak anak perusahaan, laporan keuangan juga semakin rumit, sehingga auditor membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak dan menyebabkan *fee* audit juga semakin tinggi.

Penelitian Ulfasari dan Marsono (2014), Kusharyati (2013), dan Yulio (2016), membuktikan bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit, yang memiliki arti bahwa semakin kompleks suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula *fee* audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua ialah:

H2 : Kompleksitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Fee* Audit

2.9.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Fee Audit*

Menurut Susanti dan Riharjo (2013), kepemilikan institusional ialah sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh institusi atau lembaga. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dan dibagi dengan total jumlah saham beredar. Jika saham yang dimiliki oleh institusi tinggi, maka pengawasan perusahaan sangat menonjol. Kane dan Velury (2004) dalam Wedari (2015), menyatakan bahwa investor institusional memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi membuat institusi dapat mempengaruhi keputusan manajemen karena hak voting yang dimilikinya. Kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat investor institusional aktif dalam memonitor jalannya perusahaan, termasuk saat penyusunan laporan keuangan. Kane dan Velury (2004) dalam Wedari (2015) juga menjelaskan bahwa investor institusional akan memaksa perusahaan untuk melakukan audit dengan kualitas tinggi untuk menghindari kecurangan. Investor institusional cenderung meminta agar perusahaan menggunakan jasa audit dari auditor eksternal berkualitas dan memiliki reputasi baik agar mendapatkan hasil audit berkualitas tinggi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi *fee audit*, karena tingginya kepemilikan saham oleh investor institusional membuat investor institusional memiliki hak voting yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen agar melakukan audit dengan

kualitas tinggi sehingga mengakibatkan *fee* audit yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian Mitra (2007) dan Chiao (2012) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit, berbeda dengan hasil penelitian Azadi dan Mohammadi (2014) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga ialah:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.9.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit

Menurut Rukmana dkk (2017), ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dilakukan oleh auditor. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Penelitian ini menggunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan. Nugrahani dan Sabeni (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar mengakibatkan pelaksanaan audit menjadi semakin luas. Perusahaan dengan aset besar memiliki banyak transaksi yang membuat cakupan audit lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset sedikit. Di perusahaan dengan aset besar, auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit untuk mendukung pendapatnya. Banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan dan diperiksa auditor

menyebabkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit di perusahaan dengan aset besar juga semakin banyak sehingga dapat meningkatkan *fee* audit. Selain itu, Simunic dan Stein (1996) dalam Ulfasari dan Maryono (2014) juga mengatakan bahwa perusahaan dengan total aktiva besar memiliki kemampuan diatas perusahaan kecil untuk mendapatkan modal, hal ini berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan yang memiliki total aktiva besar dalam membayar *fee* audit. Perusahaan dengan total aset besar dinilai mampu membayarkan *fee* audit yang lebih tinggi. Menurut Palmrose (1986) dalam Sanusi dan Purwanto (2017), dengan banyaknya aset yang dimiliki, biasanya perusahaan besar menggunakan auditor eksternal bergengsi, yang tentu akan berpengaruh terhadap bertambahnya *fee* audit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rukmana dkk (2017), Ulfasari dan Marsono (2014), Chandra (2015), dan Immanuel dan Yuyetta (2014) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *fee* audit. Yang artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga *fee* audit yang dibayarkan.

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit.